1. **Pendahuluan**

Sebagai ajaran Islam yang dinyatakan final sampai akhir jaman, bukan berarti para penganut agama Islam selalu sama dalam memahami, mengkaji dan mengamalkan teks-teks yang ada dalam kitab suci Al-qur’an. Dalam pengalaman sejarah, fenomena keberIslaman individu atau kelompok dalam bermasyarakat, menunjukan bahwa Islam hanya satu yang diturunkan oleh Tuhan, namun prakteknya dalam kehidupan sosial telah melahirkan multiinterpretasi terhadap Islam. Dengan kata lain bahwa Islam bagi kaum muslimin memang ada satu yang diwahyukan dan dimandatkan Tuhan, tetapi terdapat banyak penafsiran tentang Islam (Esposito, 2004: xv-xvi).

Sehingga menimbulkan banyak perubahan-perubahan seperti paham, keyakinan, aliran dan gerakan-gerakan keagamaan. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi dan kondisi yang terus berubah sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi meskipun dalam kitab sucinnya tidak pernah berubah.

Dalam perkembangannya, di dunia Islam muncul gerakan-gerakan keislaman yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan Islam yang dominan di percayai dan diyakini oleh umat Islam secara umum. Ikhwanul Muslimin, Jami’at Al-Islamiyah, Hizbut Tahrir, Wahabisme dan Salafi Jihadis adalah sebagian dari deretan organisasi atau gerakan keIslaman yang dimaksud. Spektrum Gerakan dari organisasi ini sama-sama mengedepankan formalisasi syariat dan menegakkan khilafah dalam dunia Islam. Gerakan Islam tersebut pada umumnya disebut sebagai “Gerakan Islam Transnasional”.

Gerakan Islam baru di Indonesia umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu keinginan untuk menerapkan Syari’at Islam dan Sistem Kekhilafahan Islam dengan *scope* gerakan dan metode yang berbeda-beda. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslim, Salafi-Wahabi merupakan representasi gerakan baru Islam di Indonesia yang mempunyai jaringan dan anggota lintas-negara.

Salah satu dari model gerakan Islam transnasional yang dimaksudkan oleh penulis dalam tulisan ini adalah Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Jerusalem Timur. Namun dalam penelitian tulisan ini lebih memfokuskan pada Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar. Oleh karena itu, merasa penting bagi penulis untuk mengkaji, meneliti dan menjelaskan tentang latar belakang kehadirannya, strategi gerakan dan respon Masyarakat dan ormas di Kota Makassar.

1. **Kajian Pustaka**
   1. **Istilah Gerakan Islam Transnasional**

Gerakan Islam Transnasional adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara (pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara). Dalam upaya menjelaskan terminologi Islam transnasional atau “transnasionalisme Islam” (Islamic transnationalism) sebagai nomenklatur, Masdar Hilmy meminjam pengertian yang diungkapkan oleh J.R Bowen yang mencakup tiga hal yaitu: (1). Pergerakan demografis, (2) lembaga keagamaan transnasional, dan (3) perpindahan gagasan atau ide (Hilmy, 2011: 2 ).

Sepanjang pengetahuan penulis, istilah Islam transnasional pertama kali disampaikan pada tahun 2007 oleh KH Hasyim Muzadi, seorang ulama dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Menariknya, ideologi ini menurut Hasyim Muzadi bukan hanya datang dari Timur Tengah, tapi juga dari Barat. Kelompok seperti Majelis Mujahidin, Ikhawanul Muslimin, Al-Qaedah disebut sebagai kelompok yang dikategorikan ideologi transnasional dari Timur (NU Online, 29/04/2007).

Sumber lain menyebutkan bahwa Istilah transnasional dikemukakan oleh Ahmad Syafii Ma’arif mantan ketua umum Muhammadiyah. Ahmad Syafii Ma’arif menyebut secara spesifik kepada HTI sebagai gerakan politik transnasional, ia menyoroti dalam bukunya tentang HTI “….sorotan yang berikutnya adalah HTI, berbeda dengan MMI yang bercorak Indonesia, HTI adalah gerakan politik Islam Transnasional yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Namun, beliau tidak menafsirkan organisasi apa saja yang dimaksudkan dalam kategori gerakan Transnasional (Ma’arif, 2009: 191). Geakan Islam transnasional yang peneliti dalam penelitian ini sebagai nomenklatur untuk menjelaskan terkait dengan aktivitas dan gerakan HT di Kota Makassar.

* 1. **Konstruk Teoritik Tentang Transnasionalisme HT**

Pengkategorian Hizbut Tahrir sebagai gerakan transnasional dikarenakan gerakan Hizbut Tahrir tidak murni berasal dari ruang lingkup historisitas keindonasiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Syafi’i Maarif, bahwa HTI adalah gerakan yang lahir di luar konteks Indonesia, meskipun gerakan mereka tidak mengarah pada aspek radikalisme dan anarkisme. Dari pernyataan di atas maka istilah Islam transnasional yang dilekatkan kepada HTI menjadi sulit untuk atau dibantah. Sebab gagasan transnasionalisme Hizbut Tahrir hadir di Indonesia telah membawa doktrin ideologi Islam yang bersifat partikular dari Timur Tengah tanpa adanya proses kontekstualisasi sesuai dengan budaya dan kultur di Indonesia.

Untuk menjelaskan tentang Transnasionalisme Islam, agenda politik, dakwah Islam, jaringan serta kiprah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar dapat dijelaskan dan dianalisis melalui tiga konstruk teoritik yang dikemukakan oleh Peter G. Mandaville, antara lain: (1) teori perjalanan *(travelling theory)*, (2) teori hibriditas, dan (3) teori diaspora (Peter G. Mandaville. 2001: 86). Ketiga konstruk teoritik ini juga pernah dijelaskan oleh Masdar Hilmy dalam melacar akar-akar sejarah doktrin ideologi transnnasionalisme Islam yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Selain dari ketiga teori diatas, tentu saja masih banyak kerangka teoretik lain yang bisa menjelaskan kemunculan entitas Islam transnasional di indonesia. Seperti genealogi-nya Michel Foucault yang cenderung melihat realitas agama sebagai kuasa dalam dialektika paham-paham keagamaan (Michael Foulcault dan Jeremy R. Carrette. 1999: 41). Hal ini terjadi karena pandangan Foucault yang cenderung memandang pengetahuan yang serba kekuasaan *(knowledge is power).* Seperti pengetahuan akan doktrin-doktrin tentang agama dapat dijadikan alat untuk melegitimasi setiap tindakan, politik kekuasaan maupun kekerasan atas nama agama.

1. **Metode Penelitian.**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial-historis yang di dalamnya menjelaskan proses transnasionalisme Islam. Penelitian kualitatif melihat realitas secara subyektif. Dalam penelitian ini penulis berusaha menangkap pemahaman si subyek penelitian *(native understanding)* tentang norma, nilai dan makna dibalik gejala yang diamati. Singkatnya peneliti berusaha merekonstruksi gejala dan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat pada realitas masa silam. Selain itu, model penelitian ini menggunakan logika berfikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum, sehingga menghasilkan pola (pattern) khusus dan unik (ideografik).

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang Islam Transnasional: Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makassar (2000-2012), dilakukan di Kota Makassar. Pemilhan daerah penelitian ini dilakukan dengan *purposive* yakni pemilihan secara sengaja.

1. **Teknik Analisis Data**

Langkah pertama yang akan dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan *(library reseach)*. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan atau relevansinya dengan bahan penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mewawancarai sejumlah aktivis HTI yang di anggap mengetahui sejarah maupun kiprah HT di Kota Makassar sebagai obyek yang diteliti. Pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi, berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, rapat dan sebagainya guna menunjang serta memperkuat pengumpulan data yang ada (Arikunto, 2002: 206).

1. **Teknik Analisis Data**
2. **Kritik Sumber**

Data yang diperoleh pada tahap heuristik masih diragukan validitasnya, untuk itu perlu dilakukan kritik sumber. Setiap sumber memiliki aspek eksteren dan interen. Aspek eksteren berkaitan dengan validitas sumber yang dibutuhkan, sedangkan aspek interennya berkaitan dengan apakah sumber sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak.

1. **Interpretasi**

Setelah data-data dianalisis melalui kritik sumber maka, selanjutnya dilakukan interpretasi data. Hal ini, dilakukan untuk memberikan tafsiran terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan telah dikritik sehingga dapat dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. (Sjamsuddin, 2007: 29). Fakta-fakta sejarah yang jejak-jejaknya masih nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau. (Daliman, 2012: 83).

1. **Teknik Penulisan**

Historiografi, merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian metodologi penulisan sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi sehingga dapat menjelaskan tentang kiprah HT secara kronologis dan menghubungkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi hubungan kausalitas.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Latar Belakang Masuk dan Berkembangnnya HT di Kota Makassar**

Munculnya gerakan Islam merupakan bentuk reaksi terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam sehingga muncul kecendrungan untuk kembali ke identitas Islam (Rahmat, 2006: 3). Keinginan kembali ke identitas Islam itu didorong berbagai persoalan yang melanda umat Islam. Runtuhnya sosial-politik Islam pada abad ke 17 dan 18 akibat kolonialme bangsa barat cukup membawa pengaruh yang besar akan keinginan untuk kembali ke identitas Islam seperti masa kejayaan Islam (Rahmat, 2006: 4).

Ada dua aspek yang melatar- belakangi berdirinya Hizbut Tahri, yaitu latar belakang ideologi dan konteks. Aspek yang disebut pertama, HT didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah. Artinya secara doktrinal narmatif dapat dikemukakan bahwa Hadirnya Hizbut Tahrir di Kota Makassar dilatar belakangi oleh semangat mereka untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita bersamanya sebagaimana yang termaktum dalam tujuan HT secara umum. Berdirinya HT merupakan penjabaran mereka dari doktrin teologis yang secara tekstual berdasarkan Al-Qur’an Surat Al- Imran ayat 104 yang berbunyi: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada amal yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Kedua adalah latar belakang konteks. Hizbut Tahrir menilai bahwa saat ini dunia dikuasai oleh ide-ide, sistem-sistem dan hukum-hukum kufur. Seluruh negara di Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin, menggunakan asas-asas kenegaraan seperti asas-asas Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, Nasionalisme, Patriotisme. Demikian halnya dengan di Asia, dan Timur Tengah, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, ide-ide, hukum-hukum, kekuasaan dan dominasi negara-negara Amerika dan Eropa yang mereka sering menyebutnya sebagai Negara kafir telah menguasai segala aspek kehidupan. Keadaan ini dinilai oleh Hizbut Tahrir sebagai ketertintasan, kemelaratan dan keterbelakangan umat Islam.

Lebih spesifiknya di Kota Makassar, hadirnya Hizbut Tahrir dilatarbelakangi oleh semangat para aktivis untuk melanjutkan dan mengembangkan aktivitas agenda politik di berbagai daerah termasuk Kota Makassar didalamnya. Perlunya HT hadir di Kota Makassar disebabkan karena masyarakat belum terlalu paham terkait dengan agenda politik dan ideologi yang dikembangkan oleh HT. mengingat keadaan masyarakat Islam di Makassar pada masa Orde baru tidak terlalu mendapat ruang yang cukup terbuka. Namun HT hadir di Kota Makassar mendapatkan momentum yang tepat setelah berakhirnya pemerintahan pada masa Orde Baru, era ini lebih populer dengan istilah era reformasi. Dalam konteks sosial dan politik yang tidak mencekam serta terbukanya kran demokrasi. Telah memberikan ruang kepada aktivis HT untuk melebarkan sayapnya sampai di Kota Makassar.

1. **Strategi Gerakan HT di Kota Makassar**

Dalam strategi gerakannya, Hizbut Tahrir memperkenalkan istilah *ghawz alfikr* (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang selama ini mereka anggap sebagai persepsi yang keliru. Mereka juga berusaha untuk membebaskan umat manusia dari pengaruh ide-ide barat, dan menjelaskannya sesui dengan cara-cara yang dinilai sebagai ketentuan Islam (Hizbut Tahrir, 2000. a: 23).

Selain itu, perjuangan Hizbut Tahrir senantiasa mengikuti metode atau dakwah yang ditempatkan Rasulullah sejak dari Makkah hingga tegaknya negara Islam yang pertama Madinah *al-Munawwarah*. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di *darul kufur* (wilayah orang-orang kafir) karena mereka merupakan hukum-hukum kufur yang tidak diturunklan Allah swt maka keadaan mereka serupa dengan mekkah ketika Rasulullah Muhammad saw diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Untuk itu safi Mekkah dijadikan tempat berpijak dalam mengembang dakwah dan mengikuti cara Rasulullah Muhammad saw hingga berhasil mendirikan suatu *Daulah Islamiyah* di Madinah.

Karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak Kapitalistik maupun Sosialitik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekulerisme seperti Demokrasi, Patriotisme, Sosialisme, dan Kapitalisme atau isme-isme lain, (Tim Hizbut Tahrir, 2009: 68-69).

Dari metode dakwah yang digunakan Rasulullah saw, terlihat dengan jelas bahwa adanya perubahan pemikiran dan perasaan masyarakat saja tidaklah cukup untuk menegakkan Islam. Selain perubahan pemikiran dan persaan masyarakat juga diperlukan *thalabun nushrah* (upaya penggalangan dukungan) dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik agar memainkan perannya, yakni menyingkirkan penguasa agen penjajah dan memberikan dukungannya kepada Hizbut Tahrir sehingga kekuatan Islam bisa ditegakkan, (Tim Hizbut Tahrir, 2009: 69-70).

Sebagaimana Allah mewajibkan kaum muslim agar selalu terikat dengan hukum-hukum atau aturan-aturan Islam secara menyeluruh, baik yang menyangkut hubungannya dengan khaliq, yang termaksud perkara akidah dan ibadah, ataupun yang menyangkut hubungan dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum tentang akhlak, hukum-hukum tentang makanan, pakaian, ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum tentang muamalah dan perundang-undangan. Dengan mencoba pola dakwah Rasulullah Muhammad saw, Secara garis besar HT menetapkan langkah operasionalnya dalam tiga tahapan dakwah antara lain tahap pengkaderan dan pembinaan, tahap berinteraksi dengan umat dan tahap pengambilalihan kekuasaan. Tahapan ini dijadikan sebagai strategi gerakan dalam meraih cita-cita organisasinya.

1. **Tahapan Pengkaderan dan Pembinaan**

Pada tahap ini pembinaaan yang mereka lakukan adalah melahirkan orang-orang yang menyakini keberadaan Hizbut Tahrir sebagai organisasi atau gerakan yang berlandaskan pandangan murni Islam yang dimana tujuannya agar memperbanyak dukungan dan penganut guna menunjang keberhasilan gerakan (Rahmat, 26: 54). Tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalal al-tatsqif*) ini dilakukan melaui *halaqah-halaqah.* Tahapan ini dilaksanakan untuk membina dan membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan model Hizbut Tahrir dalam rangka membentuk kerangka tubuh partai, memperbanyak pendukung dan membina para pengikutnya dalam halaqoh dengan tsaqafah Hizbut Tahrir yang terarah dan intensif.

Kaderisasi dalam sebuah gerakan ditunjukan untuk mencetak kader-kader dan anggota baru yang memiliki kepribadian Islam. Kader-kader juga harus mampu mengemban tugas dan aktivitas dakwah dalam mempengaruhi masyarakatnya dengan konsep Islam. Konsep membangun kesadaran umat sebagaimana yang dimaksudkan oleh mereka yaitu untuk membangun opini umum tentang Islam di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat Islam bisa melakukan perubahan secara. Oleh karena itu, pembinaan (*tatsqil*), baik yang ditunjukkan untuk kaderisasi mampu membina masyarakat secara umum, akan menentukan keberhasilan gerakan umat Islam dalam membentuk opini Islam di tengah-tengah masyarakat dan meraih dukungan dari *ahl al-quwwah* (al-Wa’ie, 2009: 59). Menguatnya ideologi dan regenerasi kader-kader baru adalah hasil akhir yang bisa diharapkan dalam pengkaderan dan pembinaan.

1. **Tahapan Berinteraksi dengan Umat**

Setelah melakukan pembinaan dengan tujuan mencari dukungan dalam membentuk kelompok gerakan atau organisasi, secara tidak langsung orang-orang yang telah dibina tersebut mulai memahami dan mengenal Hizbut Tahrir sebagai organisasi dan gerakan Islam sehingga dengan keadaan tersebut angota-anggota baru dengan mudah dan serta merta menerima metode, ide-ide serta apa apa yang diserukan oleh Hizbut Tahrir kepada mereka guna menunjang keberhasilan dalam pembentukan negara Islam. Pada tahap kedua ini pula orang-orang yang telah dilakukan pembinaan secara tidak langsung mengenal dan bahkan berani memisahkan diri dari hal-hal yang bagi mereka bertentangan dengan Islam atau bersikap apatis, bahkan anti barat guna membentuk perlawanan terhadap segala hal yang bertentangan dengan Islam dalam artian melakukan pemurnian Islam (Mubarok, 2008: 301).

Tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa’ul ‘alalummah*), yaitu langkah aktivis HTI untuk mendorong masyarakat dalam rangka mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umatyang akan mendorongnya untuk berusaha diwujudkan dalam realita kehidupan. Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, sehingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan umatnya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Bersama-sama dengan Hizbut Tahrir umat melakukan aktivitas untuk mendirikan daulah khilafah, mengangkat seseorang khalifah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahapan ini Hizbut Tahrir mulai beralih mengajak kepada masyarakat dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Usaha seperti ini tetap dilakukan sampai mereka berhasil membentuk partai bersama-sama para anggota dan kadernya yang telah menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Mereka yang telah berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut, berkewajiban untuk mengemban dan menyampaikannya pada masyarakat.

1. **Tahapan Pengambil alihan Kekuasaan**

Tahapan Pengambilalihan kekuasaan (*Marhalah Istilam al-Hukm*). dalam tahapan ini bermaksud untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebar luaskan risalah Islam keseluruh dunia (Hizbut Tahrir, 2000. b: 57-73.). Sebagaimana dengan tujuan umat dari Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide yang mereka anggap sebagai ide yang rusak menjadi ide-ide Islam, sehingga menjadi sebuah opini umum di tengah masyarakat serta menjadi sebuah persepsi bagi manusia. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikannya dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan dan ajaran yang sesuai dengan Islam.

Sampai sekarang, agenda politik dan aktivitas dakwah yang dimainkan oleh HT maupun HTI belum sampai pada tahap ini. Pada umunya aktivitas HT di Kota Makassar lebih banyak berkutak pada tahap perekrutan dan pembinaan ummat. Salah satu kelemahan yang peneliti lihat atas ketidakmampuan HT memasuki agenda atau tahapan terakhirnya, karena agenda dan ideology HT tidak mampu meruntuhkan narasi-narasi besar yang dikembangkan oleh masyarakat modern seperti liberalisme, kapitalisme, demokrasi, Pancasila dan NKRI.

1. **Respon Tokoh Masyarakat dan Ormas terhadap Aktivitas HT di Kota Makassar**

Berbagai aktivitas HT di Kota Makassar adalah kontribusi kongkrit di tengah masyarakat, namun, disisi lain, keberadaan HT telah mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat baik dari tokoh masyarakat, kalangan akademis maupun dari kelompok atau organisasi sosial kemasyarakatan (ormas). HT sebagai salah satu organisasi Islam kontemporer memang menjadi perbincangan tersendiri khususnya di kalangan umat dan ormas Islam. Tanggapan atau respon mereka terhadap pemikiran dan dakwah HT, terlihat beragam. Ada yang menilai kehadiran HT dianggap ‘melengkapi’ dari gerakan Islam yang sudah ada. Ada juga yang menilai bahwa kehadiran HT dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan dan eksistensi masyarakat yang bersifat heterogen khususnya di Kota Makassar. Perlu dipahami bersama bahwa respon mereka khususnya tokoh masyarakat dan kalangan akademis belum tentu dianggap mewakili respon masyarakat luas. Begitu juga secara kelembagaan, respon ormas adalah tanggapan yang bersifat institusional, tetapi secara personal (individu-individu) dalam lembaga belum tentu mereka menyetujuinya secara keseluruhan. Hal ini disebabkan banyaknya individu-individu yang terlibat dan aktif dalam ormas tertentu, tetapi mereka juga ikut mendukung dan aktif dalam kegiatan yang diprakarsai oleh HT.

Hafidz Abdurrahman menegaskan bahwa kekhalifahan dapat dihidupkan kembali ketika sebuah perubahan sikap terjadi pada masyarakat Muslim. Hal ini hanya dapat dibawa melalui khotbah, pendidikan dan pengembangan diri seorang Muslim secara komprehensif (Republika 3 September 2005). Jelas bahwa HTI sedang mencoba untuk mengubah sikap Muslim di Indonesia terhadap Syariah dan Khilafah. HTI berpendapat bahwa kekhalifahan hanya dapat dibangun jika gagasan didukung oleh umat Islam.

HTI menyadari sepenuhnya dari pengaruh yang yang terbatas dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2005, itu menunjukkan bahwa hanya 3,3% Muslim Indonesia yang mendukung HTI dibandingkan dengan 71,7% untuk Nahdlatul Ulama, 54,6% untuk Muhammadiyah dan 59,5% untuk MUI (Koran Tempo, 17 Maret 2005). Survei ini dilakukan sebelum membentuk FUI (yang melihat HTI berkerja lebih erat dengan MUI).

Akhir-akhir ini aktivitas HTI semakin berkembang dan menunjukan kuantitasnya, terutama dalam kegiatan-kegiatan akbar dan aksi damainya di Kota Makassar, akan tetapi perubahan HTI tidak harus dinilai dari perspektif kekuatannya. Namun, untuk menilai pertumbuhan HTI yaitu dengan mengamati kegagalan organisasi-organisasi mainstream Muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta sejumlah organisasi lokal lainnya. Untuk aktivis kalangan muda Islamdari organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi-organisasi ini telah menjadi terlalu dekat dan dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.

Dengan demikian, organisasi ini telah kehilangan kredibilitas di mata banyak generasi muda Indonesia. Satu hal yang perlu peneliti garis bawahi bahwa kaum muda saat ini dalam kalangan NU dan Muhammadiyah telah menjadi acuh terhadap ancaman dari gerakan-gerakan Islam seperti HTI. Perpecahan di dalam NU juga telah memperlihatkan kepada publik bahwa HTI memperoleh lebih banyak dukungan, salah satu contoh dari perpecahan ini adalah kehadiran pemimpin NU pada Konferensi Khilafah tahun 2007. Ini adalah kenyataan bahwa meskipun ketua NU, Hasyim Mizadi menyatakan dengan jelas bahwa NU berlawanan (tidak setuju) dengan visi HTI untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Islam.

Sementara dikalangan akademisi, Hasil wawncara penulis dengan Dr. Abdullah. Ia mengemukakan bahwa Keberadaan HT di Kota Makassar secara kelembagaan tidak terlalu populer karena selalu mendapat counter dari kelompok-kelompok muslim yang lebih rasional. Isu penegakkan syariat Islam yang di usung oleh Hizbut Tahrir sebenarnya terkadang bertentangan dengan sebuah realitas. Karena yang dikatakan dengan negara Islam itu selalu memunculkan multiinterpretasi, Negara Islam yang ada di Madinah itu sebagai contoh dan menjadi dasar atau acuan untuk menafsirkan bagaimana membangun negara (Wawancara dengan Dr. Abdullah, M.Ag di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik tanggal 5 April 2016).

Pandangan Dr. Abdullah dinilai sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh muslim moderat. Dengan meminjam pandangannnya Ali Abdur Raziq, bahwa di dalam Islam tidak di jelaskan secara detail tentang kewajiban untuk membentuk negara Islam. Nurcholis Madjid dan Harun Nasution pernah mengatakan bahwa di dalam Al-qur’an tidak ada negara Islam. Yang ada adalah kewajiban untuk membentuk negara bukan negara Islam, dan di dalam kewajiban membentuk negara itu kita menegakkan Islam secara substansial bukan hanya sekedar atribut dan simbol-simbol belaka. Terkait dengan ide penegakkan Khilafah yang di kembangkan oleh HT bagi Dr. Abdullah adalah keinginan yang sia-sia sebab ide mereka adalah ide yang utopis, idealistis dan tidak realistik, sebab mereka lebih menjadi dasar negara Islam dalam perspektif HT. Dan tidak menjadi Islam ala Madinah. Madinah menjadi contoh konsep civil society sebagai model negara yang penuh peradaban (Wawancara dengan Dr. Abdullah, M.Ag di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik tanggal 5 April 2016).

Selanjutnya, mengenai respon tokoh umat Islam, adalah respon yang pernah dikemukakan oleh KH. Dr. Mustamin Arsyad, MA. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisi Hubungan Internasional MUI Sulawesi Selatan dan Dewan Pakar KPPSI Sulawesi Selatan. Terkait dengan aktivitas dakwah HT, ia menyatakan bahwa: HT punya prospek yang bagus ke depannya karena landasan perjuangannya tidak dilakukan dengan kekerasan dan bukan jalan yang ekstrim atau brutal, dan menerapkan sebagaimana metode yang pernah diajarakan oleh Rasulullah SAW. Dalam dakwahnya, Rasulullah melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat dimulai dengan proses penyadaran. Langkah seperti inilah yang juga dilakukan oleh para aktivis HT.

Mereka yang bergabung di HT juga terkenal sangat ulet dan konsisten dengan metode perjuangannya. Namun yang perlu di sadari bahwa perjuangan itu mempunyai target. Karena itu, jangan bersikap apriori untuk langsung mau menikmati hasil perjuangan saat ini. Lebih lanjut Arsyad mengatakan jangan berjuang menegakkan Islam, lalu langsung mau menikmati hasilnya sekarang, karena bisa jadi perjuangan hari ini bisa terwujud nanti pada generasi berikutnya (Jurnal Al-Wai’e No. 84 Tahun VII, 2007: 88).

Dikalangan ormas NU dan Muhammadiyah belum ada keputusan atau respon mereka atas keberadaan dan aktivitas Hizbut Tahrir di Kota Makassar. Akan tetapi, secara organisatorik, NU dan Muhammadiyah, telah mengeluarkan keputusan dalam merespon aktivitas yang dilakukan oleg gerakan Islam Transnasional termaksud HT di dalamnya.

Pada bulan Desember 2006 organisasi massa (ormas) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Drs. H. A. Rosyad Sholeh. SKPP ini berisi di keluarkan dengan Nomor: 149/Kep/I. 0/B/2006 tentang “Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolodasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah” (Wahid (ed), 2009: 179).

Di dalam SKPP ini terdapat 10 butir keputusan yang dituangkan dan dikeluarkan dengan tujuan “menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan persyarikatan”. Secara garis besar tindakan yang disebut merugikan itu antara lain adalah infiltrasi di kalangan internal Muhammadiyah dari organisasi lain yang memiliki paham, misi, dan kepentingan yang berbeda dengan Muhammadiyah (Wahid (ed), 2009: 179). Langkah Muhammadiyah diikuti oleh Nahdlatul Ulama dengan mengeluarkan pernyataan dan penolakan PBNU terhadap ideologi dan gerakan ekstremis transnasional.

Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesi, bahkan di Dunia, telah mengeluarkan berbagai pernyataan resmi yang menolak kelompok-kelompok garis keras yang mengkampanyekan Khilafah Islamiyah sebagaimana yang diwacanakan oleh Hizbut Tahrir maupun yang mengkampanyekan isu-isu terkait Negara Islam. Pernyataan ini dikeluarkan oleh PBNU pada bulan November 2007 yang bertempat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur. PBNU menyelenggarakan forum Bhatsul Masa’il untuk membahas isu-isu seputar Khilafah Islamiyah, pengambil alihan mesjid-mesjid NU oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengatas namakan gerakan dakwah, gerakan sposial, mupun gerakan politik (Wahid (ed), 2009: 254).

Salah satu rekomendasi yang disampaikan PBNU dari forum Bhatsul Masa’il tersebut adalah tidak ada nas dalam Al-Qur’an yang mendasari gagasan tentang Negara Islam atau perlunya mendirikan Nrgara Islam. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah sepenuhnya adalah *Ijtihadiah* atau interpretasi belaka. Pengamat menyebut Khilafah Islamiyah sebagai ideologi trasnasional yang membahayakan keutuhan Pancasila dan NKRI serta menghibau warga Nahdilyn untuk mewaspadai gerakan ini (Wahid (ed), 2009: 254).

**Kesimpulan**

1. Masuknya HT di Kota Makassar dilatari oleh aspek ideologis dan aspek konteks global serta realitas sosial dan politik setempat yang menghendaki kehadirannya untuk melanjutkan aktivitasnya diberbagai daerah
2. Strategi gerakan HT merupakan metode praktis sebagai usaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Ada tiga strategi yang menjadi taktis HT yaitu: (a) tahappembinaan dan pengkaderan, (b) tahap berinteraksi dengan umat (c) tahap pengambil alihan kekuasaan. Strategi ini menjadi strategi umum HT.
3. Respon tokoh masyarakat terkait aktivitas HT di kota Makassar terdapat dua kategori (pro dan kontra), tidak semua menerimanya dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan organisasi kemasyarakatan secara organisatoris dengan tegas menolak semua jenis gerakan Islam transnasional yang dapat merugikan amal usaha dan perserikatannya.

**Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukan di atas maka, penulis mengajukan beberapan saran sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi yang sah dalam Negara Indonesia, gerakan HT harus dipandang secara bijak dan tetap diberikan ruangnya selama aktivitasnya tidak bermaksud mencederai sistem demokrasi dan mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI yang tengah berlangsung di Indonesia
2. HTI sebagaimanifestasi gerakan Islam transnasional, sebaiknya harus membuka diri dalam berinteraksi dengan masyarakat dan organisasi massa Islam. HTI seharusnya sama-sama berperan untuk membina umat Islam (peran substantif) di Kota Makassar tanpa perlu memperdebatkan perbedaan yang ada (memunculkan superioritas simbolik)
3. Kehadiran HT di Kota Makassar tidak perlu dibenci, kehadirannya juga sekaligus menjadi kritik diri bagi Ormas seperti NU dan Muhammadiyah agar mereka kembali membangun dakwah Islam yang lebih bersifat inklusif, moderat dan toleran
4. **Daftar Pustaka**

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Esposito, John L (Ed.). 2004. *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (al-sirat al-mustaqim)*. Alih Bahasa Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.

Hilmy, Masdar. 2011. Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Jurnal Islamica*. Vol. 6, No.1.

Hizbut Tahrir, 2000a. *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, Bogor: Pustaqa Thariqul Izzah.

, 2000.b. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir,* terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

, 2009a. *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia*, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam,* Jakarta: HTI Press.

, 2009b. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir.* cet. III. Bogor: Thariqul Izzah.

Ismail al-Wahwah. 2007. Dunia Membutuhkan Khilafah. Majalah *Al-Wa'ie*, No.VII, edisi 1. 31 September 2007.

Jurnal Al-Wai’e No. 84 Tahun VII, 2007

Ma’arif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refreksi Sejarah*. Bandung: Mizan.

NU Online, 29/04/2007.

Mandaville, Peter. 2004. *Transnational Muslim Politics*. Roudledge Recearch in Transnationalism. London: Roudledge.

Mandaville, Peter. 2007. *Global Political Islam.* London and New York: Routledge.

Rahmat, Immaduddin. 2005. *Arus Baru Islam Radikal : Taransmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

Republika, 3 September 2005.

Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Tempo, 17 Maret 2005.

Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.* Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika-the Wahid Institute-the Maarif Institute.

Wawancara dengan Dr. Abdullah, M.Ag pada tanggal 5 April 2016 di FUIF UIN Alauddin Makassar.